E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451
Volume 2 Nomor 1 2024

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE
ON INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Filsafat Kontekstual Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Solidaritas Global sebagai Cara Membangun Kebijakan Publik di Indonesia

Antonius Bagas Prasetya Adi Nugraha [a,1]
[a] *Program Magister Filsafat Keilahian-Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia*
[1] antoniobagassj@gmail.com

Kata Kunci:
Solidaritas, Etika Moral Katolik, Masalah Sosial, Kebijakan Perilaku, Kebijakan Publik

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk melihat urgensi solidaritas global sebagai sarana untuk membangun kebijakan publik di Indone-sia. Indonesia, sebagai negara dengan beragam tantangan, ter-masuk isu-isu lingkungan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial, semakin mengakui perlunya bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Solidaritas global mengingatkan kita bahwa tantangan-tantangan ini tidak hanya merupakan masa-lah lokal, tetapi juga masalah global yang memerlukan kerja sama lintas batas. Solidaritas global yang dimaksud di sini adalah solidaritas yang mengarah pada etika moral Katolik yang berusaha mengedepankan keadilan dan perdamaian. Se-dangkan kebijakan publik sendiri memerlukan penguatan dibidang perilaku manusia. Melalui penelitian pustaka pada pemikiran Hollenbach, muncul pertanyaan apakah solidaritas menjadi penting dalam menghidupi diri sebagai warga nega-ra? Kebijakan publik bukan hanya membuat tata aturan sedemikian rupa sehingga harus ditaati, diwajibkan, dan di- jalankan oleh masyarakat. Kebijakan publik adalah pertama-tama membentuk rasa merasa sebagai warga dengan berpedoman pada kemanusiaan menuju kebaikan bersama.

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8483
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Global Solidarity as a Way to Build Public Policy in Indonesia

Keywords:
Solidarity, Catholic Moral Ethics, Social Problems, Behavioral Policy, Public Policy .

Abstract

This paper is aimed to look at the urgency of global solidarity as a means to build public policy in Indonesia. Indonesia, as a country with diverse challenges, including environmental issues, poverty, and social inequality, increasingly recognizes the need to work together with the international community to achieve sustainable development goals. Global solidarity reminds us that these challenges are not only local problems, but also global problems that require cooperation across borders. The global solidarity referred to here is one that leads to a Catholic moral ethic that seeks to prioritize justice and peace. Meanwhile, public policy itself requires strengthening in the field of human behavior. Through literature research on Hollenbach's thoughts, the question arises whether solidarity is important in living as a citizen? Public policy is not just making rules in such a way that they must be obeyed, obliged, and carried out by the community. Public policy is first and foremost about creating a sense of citizenship guided by humanity towards the common good.

Pendahuluan

Globalisasi dan interkoneksi antar negara mengacu pada proses integrasi dan saling ketergantungan antara pasar, bisnis, dan negara-negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi berkat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan modal menjadi lebih cepat dan efisien. Globalisasi melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan modal yang lebih bebas antar negara yang terlibat. Cakupan globalisasi sangat luas dan mencakup banyak aspek kehidupan manusia, antara lain ekonomi, politik, budaya, masyarakat, teknologi, dan lingkungan hidup. Dalam konteks globalisasi ekonomi, ruang lingkupnya terutama menyangkut pergerakan barang, jasa dan modal antara negara-negara yang semakin terintegrasi dan saling terhubung. Globalisasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mendorong kerja sama ekonomi internasional, mengurangi hambatan perdagangan antar negara dan memfasilitasi pergerakan modal, barang dan jasa di seluruh dunia. Namun di sisi lain, perdagangan internasional juga dapat menimbulkan dampak samping seperti hilangnya lapangan kerja di sektor tertentu akibat persaingan global. Globalisasi juga memengaruhi aspek sosial-budaya dan dan jika tidak waspada maka juga akan memengaruhi identitas kebangsaan.

Indonesia sendiri tentu juga terdampak oleh globalisasi ini. Dapat kita sebutkan misalnya saja globalisasi ekonomi, perubahan iklim, isu pengungsi dan migrasi, ketahanan pangan, perbatasan dengan negara-negara di Asia, dan kemiskinan serta ketidaksetaraan termasuk korupsi. Presiden Jokowi dalam visinya membangun generasi emas 2045 diperlukan sejumlah akselerasi pembangunan terutama karakter kebangsaan Indonesia yaitu kolaboratif, inklusif, dan progresif. Untuk mencapai hal tersebut, menurut penulis, tak ada cara lain selain mempercepat pembangunan terutama pertumbuhan di sektor sosio-kultural dan keadilan. Kunci akselerasi pertumbuhan itu adalah membangun kebijakan publik.

Namun, kebijakan publik itu perlu di bangun berdasarkan konteks yakni dalam perjuangan bersama seluruh umat manusia yang merasakan kesenjangan dan ketidakadilan. Oleh karena hal itu, solidaritas global menjadi hal yang penting untuk membangun kebijakan publik. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS menyampaikan bahwa dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Satu-satunya cara untuk mengatasi menurunnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan memperkuat solidaritas global dan tanggung jawab kolektif. Bagi Indonesia, kepemimpinan global bukan sekedar memaksakan kekuasaan atau mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan global adalah tentang mendengarkan orang lain, mendamaikan beragam kepentingan atau membangun jembatan, secara konsisten mematuhi hukum internasional dan menghormati semua negara secara setara.[1]

Solidaritas global dalam hal ini menekankan pada kepedulian terhadap kemanusiaan melalui hak asasi manusia dan keadilan. Hollenbach sendiri menekankan bahwa dalam unsur pemerintahan diperlukan solidaritas intelektual dan memperjuangkan kebaikan bersama secara global. Hollenbach mendukung kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu hak asasi manusia, termasuk isu-isu global seperti perubahan iklim, pengentasan kemiskinan dan perdamaian. Ia percaya bahwa solidaritas global dan kerja sama antar negara adalah kunci untuk mencapai kemajuan signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Melalui pemikiran Hollenbach tersebut muncul sebuah pertanyaan dasar yakni apakah solidaritas itu memiliki dampak bagi terciptanya kebijakan publik yang baik? Dari hal tersebut penulis hendak menjabarkan pemikiran Hollenbach yang berkontribusi untuk menunjukkan bahwa solidaritas itu secara nyata berdampak bagi pembangunan kebijakan publik.

[1] Mandra, "Menlu Retno Ajak Negara Dunia Bangkitkan Solidaritas Global," *Rri.Co.Id*, diakses October 10, 2023, https://www.rri.co.id/internasional/372151/menlu-retno-ajak-negara-dunia-bangkitkan-solidaritas-global.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian literatur untuk menggali keterkaitan solidaritas global dengan kebijakan publik di Indonesia. Penulis berusaha mengumpulkan data melalui analisis mendalam dan pembacaan pada karya Hollenbach terkait dengan hak asasi manusia, solidaritas dan kebaikan bersama. Kemudian penulis menjelaskan alasan kebijakan publik menjadi hal yang disorot terkait dengan implementasi solidaritas global ini.

Hasil dan Pembahasan

Etika Global Sebagai Tanggapan Terhadap Globalisasi Ekonomi

Pemikiran etika global dimulai oleh seorang teolog bernama Hans Küng. Pemikiran ini muncul menanggapi perubahan dunia yang saling terkait satu sama lain, terlebih tumbuhnya kapitalisme dan ekonomi global yang membawa perubahan pada negara maju dan bencana kemanusiaan pada negara yang masih berkembang.

Dalam perkembangannya, kapitalisme mampu menjelma menjadi mentalitas global yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Negara-negara yang tergolong negara maju sebagian besar menggunakan kapitalisme sebagai sistem perekonomiannya. Prinsip-prinsip ekonomi liberal yakni pasar bebas telah menyebar dan berhasil menciptakan kemakmuran material yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan keduanya (bersama dengan demokrasi liberal) terjadi di negara-negara industri dan negara-negara berkembang.[2]

Di era globalisasi, semua negara akan saling terhubung satu sama lain, sehingga kesulitan dan krisis yang dihadapi suatu negara akan berdampak pula pada negara lain. Krisis ekonomi yang meluas ini terjadi seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian di era globalisasi. Sejak era globalisasi, krisis ekonomi menjadi lebih sering terjadi dibandingkan sebelumnya. Salah satu alasan utamanya adalah kemajuan di bidang teknologi informasi telah memperkuat gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke wilayah atau negara lain. Krisis ekonomi yang meluas ini terjadi seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian di era globalisasi.[3]

Globalisasi ekonomi ini merupakan anak dari liberalisme yakni neo-liberalisme. Menurut Herry Priyono, istilah 'neo-liberalisme' yang luas digunakan dewasa ini pada mulanya adalah nama yang dipakai para pejuang demokrasi di Amerika Latin untuk menggambarkan watak ideologis kolusi antara rezim kediktatoran dan ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrem. dalam proyek neo-liberalisme, tidaklah cukup prinsip pasar diterapkan pada barang/jasa ekonomi; ia harus diterapkan di bidang lain. Tidaklah cukup ada pasar, tetapi tidak boleh ada yang lain

[2] Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 2006), xiii.

[3] Febry Ferdinan Laleno, "Etika Global Guna Mengendalikan Kapitalisme Global," *LOGOS* 14, no. 2 (2017): 71.

selain pasar. Proyek neo-liberalisme bekerja laksana cemeti yang secara permanen mencambuki kita untuk melakukan renovasi kemampuan diri, juga bila renovasi itu dilakukan untuk agenda transaksi pasar. Itu adalah berita baik, sebab para pemalas akan dihukum. Tetapi pada saat yang sama, sebagaimana dalam setiap pacuan, si lambat senantiasa merangkak-rangkak di urutan belakang. Dan dalam proyek neo-liberal, ketertinggalan itu bukan karena kesalahan pacuan, melainkan karena kesalahan si lambat sendiri yang gagal merenovasi diri menjadi si cepat. Kalau sebagian besar penduduk adalah "si lambat", gambar yang tampil tentu saja proyek neo-liberal sebagai oligarki ekonomi.[4]

Küng mengajak para pelaku ekonomi untuk merenungkan bahwa aktivitas ekonomi diadakan untuk manusia sehingga martabat manusia menjadi prioritas pertama dan bukan pada skala indikator pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tata ekonomi dunia harus merumuskan suatu etika yang sesuai. Küng menguraikan garis-garis besar paradima baru etika ekonomi yang dapat mengendalikan laju kapitalisme global sehingga diperoleh suatu kebijakan ekonomi yang dapat melayani umat manusia secara keseluruhan. Menurutnya kepentingan ekonomi tidak boleh melebihi tuntutan fundamental dari alasan etis. Etika ini bersifat global karena segala permasalahan ekonomi yang terjadi dewasa ini tidak lagi menyangkut masalah domestik suatu negara melainkan sudah bersifat multinasional.[5]

Bahkan para ekonom pun tidak dapat membantah fakta bahwa kehidupan manusia tidak hanya bergantung pada perekonomian dan bahwa manusia memerlukan lebih dari sekedar perekonomian pasar demi kesejahteraan, kepuasan, dan kehidupan bersama yang baik. Atau dengan kata positif: bahkan ekonomi pasar harus melayani laki-laki dan perempuan dan bukan sebaliknya. Hal ini harus memperluas demokrasi, bukan menggantikannya atau menutupinya. Kita harus ingat bahwa perekonomian (dan juga pasar) adalah sub-sistem masyarakat, yang berdampingan dan bersama-sama dengan sub-sistem lain, seperti hukum, politik, budaya, dan agama. Prinsip rasionalitas ekonomi dapat dibenarkan, namun tidak dapat dimutlakkan. Namun, dalam neo-liberalisme ekonomi terdapat bahaya mengangkat sub-sistem ekonomi pasar menjadi sistem total, sehingga hukum, politik, budaya dan agama berada di bawah perekonomian.[6] Dari konsep etika global inilah, muncul di kemudian hari konsep mengenai solidaritas global yang tidak hanya fokus pada ekonomi dan teknologi, melainkan pada seluruh aspek kehidupan yang mendukung keberadaan ciptaan di bumi ini.

---

[4] B Herry-Priyono, "Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan" *Makalah Pidato Kebudayaan* diucapkan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, 2006).

[5] Laleno, "Etika Global Guna Mengendalikan Kapitalisme Global," 76.

[6] Hans Küng, "A Global Ethic in an Age of Globalization," *Business Ethics Quarterly* 7, no. 3 (1997): 23.

Solidaritas Global: Konsep dan Implikasinya

Solidaritas berarti bertanggung jawab satu sama lain. Solidaritas digunakan dalam arti melakukan sesuatu bersama-sama, bersatu. Solidaritas dalam tindakan berarti bersatu dengan seseorang untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama.[7] Solidaritas global adalah semangat solidaritas antar individu, komunitas, negara, dan organisasi internasional untuk bersama-sama mengatasi permasalahan bersama. Solidaritas global mencakup pengakuan bahwa semua individu adalah bagian dari satu keluarga umat manusia, tanpa memandang etnis, kebangsaan, ras, gender, ekonomi, politik atau agama. Solidaritas global juga mencakup kerja sama internasional di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan hak asasi manusia. Melalui solidaritas global, individu, komunitas, negara, dan organisasi internasional dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan bersama seperti pandemi, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan global. Solidaritas global juga dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kesenjangan global.[8]

Solidaritas global muncul dari intuisi yang kita miliki bersama mengenai hakikat keadilan dan ketidakadilan. Kita tentu saja sepakat bahwa jika kita memperlakukan seseorang secara tidak adil, maka kita bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut dengan cara tertentu. Karena kita jelas-jelas terlibat dalam penyebab kerusakan di seluruh dunia – pemanasan global adalah salah satu contohnya – maka kita bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan ini. Memahami tanggung jawab sebab-akibat dengan cara ini menghasilkan hubungan yang lebih erat antar manusia dibandingkan dengan menarik keanggotaan dalam kemanusiaan yang sama, dan hal ini juga membawa kita lebih jelas keluar dari wilayah kemurahan hati dan masuk ke wilayah keadilan.[9]

Solidaritas Global dalam Perspektif David Hollenbach

Setelah kita melihat pengertian secara umum mengenai solidaritas global. Penulis mengajak untuk melihat perspektif David Hollenbach mengenai solidaritas. Persepektif dari Hollenbach ini penting karena membawa kita pada dasar dari solidaritas yakni kemanusiaan dan keadilan yang mengarah pada kebaikan bersama. David Hollenbach melanjutkan poin kompendium tentang kebaikan bersama dengan menunjukkan urgensi yang ditimbulkan oleh globalisasi yang memaksa mereka yang mempunyai

---

[7] Kathrin Gerlof dan Anne Schindler (Ed.), *Global Solidarity - Maldekstra International 2020* (Berlin: common Verlagsgenossenschaft e.G., 2020), 6.

[8] Fadhila Pratiwi dan M. Ahalla Tsauro, "COVID-19: Nationalism and Global Solidarities COVID-19: Nationalisme Dan Solidaritas Global," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 34, no. 3 (June 22, 2021).

[9] Patti Lenard, Christine Straehle, dan Lea Ypi, "Global Solidarity," *Contemporary Political Theory* 9 (February 1, 2010): 106.

sudut pandang berbeda untuk hidup di dunia lain yang tidak berjauhan dan paralel. Ia mengatakan, misalnya, bahwa "kebutuhan untuk bekerja sama belum hilang saat ini hanya karena kita semakin sadar akan perbedaan keyakinan agama, filosofi, dan moral kita.[10]

Keterkaitan antara kebaikan individu dan kebaikan bersama tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu dan pemeliharaan kebaikan bersama tidak perlu bertentangan tetapi dapat saling melengkapi. Sama seperti tindakan berbicara tertentu bergantung pada berbagi bahasa dengan orang lain, kebebasan individu diaktualisasikan dalam konteks sosial bersama yang memungkinkan pilihan. Budaya yang berpendapat bahwa kebebasan dan saling menghormati adalah hak semua orang akan menopang keinginan orang untuk bebas dari dominasi. Solidaritas untuk kebaikan bersama dapat dicapai pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Kita dapat menggunakan ukuran solidaritas dalam masyarakat dengan pemerintahan yang independen dan bebas sebagai ukuran kebaikan relatif suatu masyarakat. Menggunakan skala ini untuk memandu pilihan kita dapat membantu kita menentukan jalan menuju masyarakat yang lebih baik. Hal ini mungkin mengarahkan cara untuk mendefinisikan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan tingkat minimum partisipasi sosial yang diperlukan untuk saling menghormati kebebasan dan martabat manusia.[11]

Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan Partisipasi Sosial

Penting untuk memikirkan hak asasi manusia sebagai jaminan bahwa setiap orang akan dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial pada tingkat yang sepadan dengan martabat pribadinya. Melihat hak asasi manusia dari perspektif relasional dan partisipatif menunjukkan mengapa hak-hak sipil, politik, sosial dan ekonomi begitu penting. Dimasukkannya seluruh hak-hak tersebut ke dalam DUHAM merupakan sebuah pencapaian yang signifikan pada tahun 1948. Pemahaman hak asasi manusia yang bersifat relasional dan partisipatif memandang hak sebagai norma yang tidak bersifat individualistis atau kolektif ideologis. Pemahaman seperti ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap perpecahan yang mengancam dunia saat ini.[12]

Pribadi manusia mempunyai nilai yang menuntut rasa hormat dalam setiap situasi dan dalam setiap jenis kegiatan. Oleh karena itu, martabat ini

---

[10] Charles C. Camosy, "Intellectual Solidarity and Transcending Polarized Discourse," Political Theology 15, no. 1 (January 1, 2014): 42.

[11] David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics, New Studies in Christian Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 82, accessed June 8, 2023, https://www.cambridge.org/core/books/common-good-and-christian-ethics/F97BDC8C380EDFB0AFB4FC284F485276.

[12] David Hollenbach, "A Relational Understanding of Human Rights: Human Dignity in Social Solidarity," *Emory Law Journal* 71, no. 7 (January 1, 2022): 1506.

harus dilihat sebagai norma yang dengannya kecukupan segala bentuk perilaku manusia dan semua prinsip moral yang dirumuskan untuk memandu perilaku harus dinilai. Martabat manusia harus dilihat sebagai realitas konkrit yang ada di mana pun orang berada. Pembacaan dan penafsiran Hollenbach terhadap tradisi hak asasi manusia dipengaruhi oleh dokumen-dokumen ajaran sosial Gereja Katolik.[13] Dengan mengakui martabat pribadi manusia sebagai hal yang penting dalam perdebatan hak asasi manusia, Hollenbach menyampaikan bahwa langkah berikutnya adalah menemukan cara untuk mengidentifikasi apa saja persyaratan spesifik dari martabat manusia dan hal ini baginya memerlukan banyak pertimbangan dan evaluasi yang cermat. Menurutnya, gagasan tentang harkat dan martabat manusia hampir tidak ada maknanya jika tidak diterapkan secara konkrit dan eksistensial pada umat manusia yang ada.[14]

Bagi Hollenbach, hak asasi manusia adalah tuntutan moral semua orang untuk diperlakukan, berdasarkan kemanusiaannya, sebagai partisipan dalam kehidupan bersama dalam komunitas manusia. Tuntutan-tuntutan moral ini pada hakekatnya akan terjamin ketika rasa hormat terhadap tuntutan-tuntutan tersebut ditanamkan ke dalam struktur dasar masyarakat.

Kebaikan Bersama Sebagai Visi Hidup di Masyarakat

Kebaikan bersama adalah konsep selanjutnya dari Hollenbach yang melengkapi konsep hak asasi manusia. Hollenbach menganggap gagasan tentang kebaikan bersama sangat penting dalam perdebatan mengenai hak asasi manusia dan menganjurkan rekonstruksi teologis mengenai hak-hak yang sesuai dengan keyakinan hukum alam tradisional bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurutnya, umat manusia bergantung satu sama lain tidak hanya untuk pencapaian kehidupan budaya yang lebih tinggi tetapi juga untuk kebutuhan kesejahteraan material-ekonomi. Hollenbach berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah tuntutan moral semua orang untuk diperlakukan, berdasarkan kemanusiaannya, sebagai partisipan dalam kehidupan bersama dalam komunitas manusia.[15]

Visinya mengenai kebaikan bersama adalah bahwa kebaikan itu benar-benar umum hanya ketika semua anggota masyarakat tanpa memandang agama, ras, etnis atau gender menciptakan dan mewujudkan kehidupan bersama. Lebih jauh lagi, suatu kebaikan dapat dikatakan jika semua anggota masyarakat mendapat manfaat dari kebaikan yang telah mereka

[13] J. Oppong, "An Assessment of David Hollenbach's Contribution to the Debate on Human Rights and Its Future Promise," *Disertasi*, Duquesne University 2010, 93. https://www.semanticscholar.org/paper/An-assessment-of-David-Hollenbach's-contribution-to-Oppong/4b5d646cf7797712748a4fbed8cae4f7fd6fb200 diakses pada 12 Oktober 2023

[14] Oppong, "An Assessment of David Hollenbach's Contribution to the Debate on Human Rights and Its Future Promise," 98.

[15] Oppong, "An Assessment of David Hollenbach's Contribution to the Debate on Human Rights and Its Future Promise," 99.

ciptakan dengan susah payah. Kebaikan bersama membantu membentuk impian dan aspirasi anggota masyarakat. Praktek-praktek sosial dan lembaga-lembaga politik mereka ditopang oleh kebaikan bersama dan masyarakat ditopang oleh partisipasi aktif semua orang dalam kehidupan publik. Dengan demikian, Hollenbach menunjukkan bahwa suatu masyarakat adalah masyarakat yang baik ketika masyarakat tersebut mempertahankan kebebasan dari tirani, penindasan, dan perang melalui rasa saling menghormati yang ditunjukkan oleh para anggotanya satu sama lain dalam interaksi dan hubungan mereka.[16] Sebab menurutnya, visi normatif kebaikan bersama dalam lingkup global mengandung arti komitmen terhadap komunitas yang mempunyai lingkup universal dan memperhatikan perbedaan-perbedaan antar bangsa dan budaya dengan segala keseriusan yang pantas mereka dapatkan. Visinya mengenai kesejahteraan umum masyarakat sipil dipandang sebagai ukuran solidaritas masyarakat yang dapat dicapai dalam suatu masyarakat.[17]

Keadilan, Cinta Kasih, Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia

Hollenbach berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas politik merupakan komponen yang sangat penting dalam menilai apa yang harus dilakukan sehubungan dengan konflik klaim dalam keputusan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangannya, meskipun pengetahuan tentang prinsip-prinsip umum dan pemahaman kritis terhadap pola-pola sosial berkontribusi dalam pengambilan keputusan moral yang konkrit, tanggapan hati nurani terhadap martabat pribadi manusia lebih dipahami sebagai tindakan cinta dibandingkan tindakan pengetahuan.[18]

Menurutnya, teori hak dan keadilan akan tetap bersifat umum dan tidak lengkap kecuali teori tersebut berasal dari pengalaman cinta yang dapat dibuktikan. Ia mengemukakan cinta manusia konkrit dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap menjadi pedoman dan norma. Prinsip-prinsip ini tetap menjadi prinsip bijak yang memandu keputusan bijaksana. Namun, cinta sejati terhadap seseorang – sebagai individu maupun anggota masyarakat – adalah satu-satunya cara untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan dan hak dalam situasi politik nilai-nilai sosial tertentu.[19]

Bagi Hollenbach, umat manusia bergantung satu sama lain tidak hanya untuk pencapaian kehidupan budaya yang lebih tinggi tetapi juga untuk

[16] Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 72.

[17] Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 239.

[18] Oppong, "An Assessment of David Hollenbach's Contribution to the Debate on Human Rights and Its Future Promise," 169.

[19] David Hollenbach, *Claims in Conflict: Retrieving and Renewing the Catholic Human Rights Tradition* (New York: Paulist Press, 1979), 173.

kebutuhan kesejahteraan material-ekonomi. Mengingat hal ini, pemulihan komitmen sosial yang aktif terhadap kebaikan bersama merupakan elemen penting dalam upaya serius untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan keadilan ekonomi. ia menyarankan agar kita bisa mengatasi masalah kemiskinan dan menghargai hak orang lain.[20] Dalam refleksinya, ia mengemukakan bahwa ukuran kesetaraan merupakan inti dari keadilan dalam segala bentuknya. Sesuai dengan pandangan para Uskup Katolik Amerika Serikat yang menguraikan tuntutan dasar keadilan pada tahun 1986, disebutkan bahwa keadilan dasar menuntut penetapan tingkat partisipasi minimum dalam kehidupan komunitas manusia bagi semua orang. Dengan demikian, hak asasi manusia mempunyai makna sosial atau relasional. Hal ini mengalir langsung dari pemahaman tentang keadilan, yang oleh Hollenbach disebut sebagai keadilan sebagai partisipasi. Ketidakadilan bagi Hollenbach adalah semacam pengucilan dari komunitas manusia.[21]

Pengucilan seperti yang ditegaskan Hollenbach mempunyai banyak bentuk, sama seperti keadilan juga mempunyai banyak bentuk. Kita mengalami marginalisasi politik ketika hak warga negara untuk memilih tidak diberikan atau kebebasan berpendapat tidak diberikan, atau dalam situasi di mana kekuasaan hanya dimiliki oleh kelas penguasa (elit) atau dalam situasi totalitarianisme (kediktatoran). Kita mengalami marginalisasi ekonomi ketika masyarakat tidak dapat memperoleh pekerjaan atau dipecat dari pekerjaannya karena keputusan yang tidak dapat mereka pengaruhi.[22] Bagi Hollenbach, dalam situasi di mana masyarakat tidak diperbolehkan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka terjadilah ketidakadilan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, orang-orang yang menghadapi kelaparan, tunawisma, dan kemiskinan ekstrem padahal masyarakat memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, diperlakukan sebagai bukan anggota dan hal ini juga merupakan ketidakadilan.[23]

Solidaritas Global dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia

Kebijakan publik adalah serangkaian arahan pemerintah yang dimaksudkan untuk membentuk keputusan dan tindakan individu, organisasi, dan lembaga pemerintah melalui undang-undang, perintah eksekutif, keputusan pengadilan, pedoman regulasi, pembuatan peraturan,

[20] Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 173.

[21] Richard B. Miller, "Justice, Peace, and Human Rights: American Catholic Social Ethics in a Pluralistic Context. David Hollenbach," *The Journal of Religion* 70, no. 2 (April 1990): 71–83.

[22] Oppong, "An Assessment of David Hollenbach's Contribution to the Debate on Human Rights and Its Future Promise," 171.

[23] Miller, "Justice, Peace, and Human Rights," 82.

memo lembaga, pernyataan penandatanganan, surat edaran lembaga, dan jenis pernyataan resmi lainnya.[24] Dari pengamatan penulis terhadap pemikiran Hollenbach mengenai hak asasi dan keadilan sebagai dasar solidaritas global, Indonesia sendiri memilik banyak nilai merah dalam menjalankan kebijakan publik. Meskipun kebijakan publik sering kali menggunakan prinsip-prinsip demokrasi secara prosedural, dalam praktiknya kebijakan sering kali dibuat semata-mata untuk kepentingan pragmatis para elit yang mementingkan diri sendiri. Unsur-unsur kebijakan publik yang seharusnya bersumber dari permasalahan publik justru berganti menjadi masalah kepentingan individu. Oleh karena itu, agar kebijakan publik muncul dari isu-isu publik, masyarakat harus bersatu untuk mendorong isu-isu publik kepada pemangku kepentingan dengan membentuk kelompok yang bersatu untuk isu yang sama.[25]

Tentu saja ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik, dan bukan melulu masalah teknis di lapangan. Para pembuat kebijakan publik sering kali mengabaikan sebuah faktor penting dalam kegagalan kebijakan publik, yakni perilaku manusianya itu banyak menentukan dampak pada institusi yang sedang mereka jalankan. Supaya solidaritas global itu dapat masuk ke dalam kebijakan publik perlu yang penerapan kebijakan perilaku. Kebijakan perilaku, sebagaimana dipahami di sini, mencakup semua cara dan cara kebijakan publik yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia dengan menggunakan wawasan dari ilmu ekonomi perilaku, ilmu perilaku, psikologi atau ilmu saraf.[26]

Oleh sebab itu, penting untuk melatih dan menata cara berperilaku dalam membangun kebijakan publik. Ilmu perilaku membantu manusia memahami tindakan atau perilakunya, mengatur kedisiplinan, alasan pilihan atau keputusan, dan dampaknya keputusannya bagi banyak orang. Kebijakan perilaku dapat menciptakan perubahan terstruktur yang membantu para praktisi dan pembuat kebijakan mendiskresikan ulang kebijakan mereka supaya berdampak dan tepat guna.

Penerapan kebijakan perilaku ini mempercepat implementasi solidaritas global di dalam pelaksanaan kebijakan publik. Setidaknya ada dua alasan mengapa kebijakan perilaku itu penting. Pertama, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi para pengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik di berbagai bidang kehidupan. Dalam artikel ini, pemahaman perilaku masyarakat menentukan berhasil tidaknya

[24] Christopher G. Reddick, *Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies*, vol. 2 (Hershey, PA: IGI Global, 2009).

[25] Jayyidan Falakhi Mawaza and Abdussatar Khalil, "Masalah Sosial Dan Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016)," *Journal of Governance Innovation* 2, no. 1 (March 17, 2020): 25.

[26] Holger Straßheim, "The Rise and Spread of Behavioral Public Policy: An Opportunity for Critical Research and Self-Reflection," *International Review of Public Policy* 2, no. 1 (April 27, 2020): 116.

suatu kebijakan. Kedua, kebijakan perilaku didasarkan pada data dan bukti. Intervensi dan eksperimen perilaku digunakan untuk membantu menguji dan memvalidasi kebijakan untuk kesesuaian dan konsistensi dengan tujuan yang ingin dicapai.[27]

Solidaritas global dapat diterapkan dalam kebijakan publik melalui penataan dalam perilaku masyarakat. Masyarakat dapat dikondisikan dengan mengganti rangsangan alamiah dengan rangsangan yang tepat sehingga memperoleh pengulangan respon yang diinginkan, dan mengubah perilakunya. Hal ini dapat berlaku pada bidang atau sektor yang berhubungan dengan manusia, khususnya kesejahteraan sosial. Kebijakan perlindungan sosial dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku sederhana. Misalnya, ganti kata "bantuan" dengan "tanggung jawab". Kata "bantuan" berarti "pertolongan", sedangkan "tanggung jawab" berarti kewajiban untuk memikul. Perubahan susunan kata ini lebih sesuai dengan tujuan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menunjang kondisi sosial masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat, namun juga mengubah perilaku pengambil kebijakan itu sendiri.

Memang ada potensi sulit untuk mewujudkan kebijakan publik yang berciri khas solidaritas global, namun Indonesia sendiri perlu mengambil sikap supaya kapitalisme global itu sendiri tidak menghancurkan potensi bangsa. Berbagai regulasi terlebih omnibus law perlu ditinjau kembali supaya tidak mudah untuk membuka ceruk-ceruk usaha tetapi menghancurkan ekosistem suatu daerah termasuk membunuh warganya perlahan-lahan dengan menghancurkan matapencaharian mereka.

Sumbangan Penting Teologi Moral Terhadap Kebijakan Publik

Penderitaan itu tidak lokal. Penderitaan bersifat global dan semua manusia di bumi ini dapat terkena dampaknya. Dalam hidup ini, kemiskinan, dan panggilan untuk memperjuangkan keadilan terhadap penderitaan menjadi sesuatu yang perlu terus diusahakan. Selama penderitaan menjadi wajah dalam hidup ini, kita selalu diundang untuk menanggapinya dengan belarasa. Oleh karena itu kita butuh bekerjasama secara global.[28]

Teologi Moral yang terdapat dalam agama adalah elemen penting dari mewujudkan solidaritas global. Agama-agama punya kontribusi penting untuk membangun solidaritas karena agama-agama ini bersifat global. Agama dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan, dan sejarah telah mencatatnya. Agama mampu hadir dan dengan gigih mengupayakan terciptanya ketenteraman, keadilan sosial, budaya non-

[27] Yanuar Nugroho, "Kunci Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik," *Tempo*, diakses pada 13 Oktober 2023. https://majalah.tempo.co/read/kolom/169602/ilmu-perilaku-kebijakan-publik.

[28] James F. Keenan, *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century: From Confessing Sins to Liberating Consciences* (New York: Continuum, 2010), 197.

kekerasan, dan saling cinta antarindividu, kelompok-kelompok keagamaan tertentu, hingga komunitas-komunitas religius dalam skala yang lebih besar. Agama dapat mempropaganda dan mengaktifkan sikap dasar seperti kesediaan untuk mewujudkan perdamaian, penolakan terhadap diskriminasi, dan toleransi.[29]

Kesimpulan

Solidaritas global memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan kebijakan publik. Solidaritas global mengingatkan kita bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya masalah lokal, tetapi juga masalah global yang memerlukan kerja sama lintas batas. Solidaritas global yang didasarkan pada etika moral Katolik yang mengutamakan keadilan dan perdamaian dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan publik juga perlu memperkuat perilaku manusia yang berpedoman pada kemanusiaan dan kebaikan bersama.

Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama dan layak untuk diperlakukan dengan adil dan setara dalam kehidupan sosial .Keadilan, dalam konteks ini, merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur distribusi sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dalam masyarakat. Keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau penindasan.

Hak asasi manusia dan keadilan saling terkait karena hak asasi manusia adalah dasar moral bagi keadilan. Hak asasi manusia memberikan landasan moral yang kuat untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang sama dan layak, sementara keadilan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi dalam masyarakat. Keadilan memastikan bahwa distribusi sumber daya dan kesempatan adil, serta bahwa proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan dilakukan. Dalam konteks solidaritas global, hak asasi manusia dan keadilan menjadi penting karena tantangan yang dihadapi tidak hanya masalah lokal, tetapi juga masalah global yang memerlukan kerja sama lintas batas. Solidaritas global yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap individu di seluruh dunia memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.

Solidaritas global dapat diterapkan dalam kebijakan publik di Indonesia dengan beberapa cara. Pertama, pemerintah Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan perdamaian. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mencapai

[29] Reinardus L. Meo, "Sumbangan Etika Global Hans Küng Demi Terwujudnya Perdamaian Dan Relevansinya Bagi Indonesia," *Jurnal Ledalero* 18, no. 1 (June 26, 2019): 108.

tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan. Kedua, pemerintah juga dapat memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang solidaritas global melalui kebijakan perilaku. Melalui pendidikan sosial, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya solidaritas global dalam mengatasi masalah bersama dan mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Dengan menerapkan solidaritas global dalam kebijakan publik, setiap warga negara Indonesia dapat berkontribusi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan damai. Solidaritas global dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk membangun kebijakan publik melalui perubahan perilaku baik bagi si pembuat kebijakan maupun masyakarat sendiri.

Daftar Pustaka

Camosy, Charles C. "Intellectual Solidarity and Transcending Polarized Discourse." *Political Theology* 15, no. 1 (January 1, 2014): 40–52.

Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 2006.

Gerlof, Kathrin dan Anne Schindler (Ed.), *Global Solidarity - Maldekstra International 2020* Berlin: common Verlagsgenossenschaft e.G., 2020.

Herry-Priyono, B. "Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan." B Herry-Priyono, "Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan" *Makalah Pidato Kebudayaan* diucapkan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, 2006.

Hollenbach, David. "A Relational Understanding of Human Rights: Human Dignity in Social Solidarity." *Emory Law Journal* 71, no. 7 (January 1, 2022): 1487.

Hollenbach, David. *Claims in Conflict: Retrieving and Renewing the Catholic Human Rights Tradition*. New York: Paulist Press, 1979.

Hollenbach, David. *The Common Good and Christian Ethics. New Studies in Christian Ethics.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Keenan, James F. *A History of Catholic Moral Theology in the Twentieth Century: From Confessing Sins to Liberating Consciences*. New York: Continuum, 2010.

Küng, Hans. "A Global Ethic in an Age of Globalization." *Business Ethics Quarterly* 7, no. 3 (1997): 17–31.

Laleno, Febry Ferdinan. "Etika Global Guna Mengendalikan Kapitalisme Global." *LOGOS* 14, no. 2 (2017): 68–88.

Lenard, Patti, Christine Straehle, and Lea Ypi. "Global Solidarity." *Contemporary Political Theory* 9 (February 1, 2010).

Mandra. "Menlu Retno Ajak Negara Dunia Bangkitkan Solidaritas Global." *Rri.Co.Id*. https://www.rri.co.id/internasional/372151/menlu-retno-ajak-negara-dunia-bangkitkan-solidaritas-global. diakses pada 10 Oktober 2023.

Mawaza, Jayyidan Falakhi, and Abdussatar Khalil. "Masalah Sosial Dan Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016)." *Journal of Governance Innovation* 2, no. 1 (March 17, 2020): 22–31.

Meo, Reinardus L. "Sumbangan Etika Global Hans Küng Demi Terwujudnya Perdamaian Dan Relevansinya Bagi Indonesia." *Jurnal Ledalero* 18, no. 1 (June 26, 2019): 103–122.

Miller, Richard B. "Justice, Peace, and Human Rights: American Catholic Social Ethics in a Pluralistic Context. David Hollenbach." *The Journal of Religion* 70, no. 2 (April 1990): 280–281.

Nugroho, Yanuar. "Kunci Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik." *Tempo*. https://majalah.tempo.co/read/kolom/169602/ilmu-perilaku-kebijakan-publik. diakses pada 13 Oktober 2023.

Oppong, J. "An Assessment of David Hollenbach's Contribution to the Debate on Human Rights and Its Future Promise," *Disertasi*, Duquesne University, 2010.

https://www.semanticscholar.org/paper/An-assessment-of-David-Hollenbach's-contribution-to-Oppong/4b5d646cf7797712748a4fbed8cae4f7fd6fb200. diakses pada 13 Oktober 2023

Pratiwi, Fadhila, and M. Ahalla Tsauro. "COVID-19: Nationalism and Global Solidarities COVID-19: Nationalisme Dan Solidaritas Global." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 34 (June 22, 2021).

Reddick, Christopher G. *Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies* vol. 2 (Hershey, PA: IGI Global, 2009)

Straßheim, Holger. "The Rise and Spread of Behavioral Public Policy: An Opportunity for Critical Research and Self-Reflection." *International Review of Public Policy* 2, no. 1 (April 27, 2020): 115–128.